

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi terkait adopsi : Data Calon Orang Tua angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat (Nama, Foto, Alamat, Riwayat Hidup)	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik pasal 17 huruf h	Terjadinya penyalahgunaan informasi	melindungi data perorangan	Permanen paling lama 30 tahun Dibuka apabila: mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan , diminta APIP dan APH untuk kepentingan umum. 1. Mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan 2. Diminta permintaan berwajib/hukum/pihak berwenang
2	Informasi Penerima Manfaat : (Asal usul, Riwayat Hidup, Penilaian PMKS, BNBA, NIK, KK)	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik pasal 17 huruf h	penyalahgunaan informasi	Melindungi data perorangan	Permanen paling lama 30 tahun dibuka apabila: mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan , diminta APIP dan APH untuk kepentingan umum.

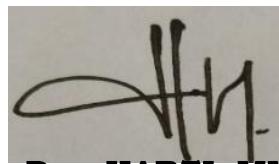
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan 2. Diminta permintaan berwajib/hukum/pihak berwenang
3	Data dampingan ODHA (Asal usul, Riwayat Hidup, Penilaian PMKS, BNBA, NIK, KK)	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik pasal 17 huruf h	penyalahgunaan informasi	Melindungi data perorangan	Permanen
4	Data anak berhadapan dengan hukum	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik pasal 17 huruf h dan huruf j	penyalahgunaan informasi	Melindungi data perorangan	<p>Permanen paling lama 30 tahun dibuka apabila:</p> <p>mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan , diminta APIP dan APH untuk kepentingan umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan 2. Diminta permintaan berwajib/hukum/pihak berwenang
5	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	mengganggu kebijakan karena adanya pengungkapan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama Berlaku

	keuangan (SPJ) berikut lampirannya		yang mendahului sebelum diaudit		
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan J			
6	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD;	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan	Selama Berlaku
		UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;			
7	Laporan Penanganan Kasus	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Keberhasilan penanganan kasus	Sampai dengan terbitnya laporan penanganan kasus selesai.
8	Daftar user password server/aplikasi/perangkat TIK	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 PP no 61 Tahun 2010 pasal 3	Melindungi dan mengamankan perangkat data	keamanan data	Permanen

		UU PSTE No 82 tahun 2012 pasal 7 ayat 1 pasal 12 ayat 1(b)			
9	Data Pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban UU 14 tahun 2008 tentang KIIP pasal 6	Menyangkut privasi mengganggu proses penyelidikan /pengawasan	menjaga kelangsungan proses hukum	sampai ada keputusan hasil pengadilan
10	Daftar usulan pengangkatan Jabatan, pemindahan ASN dari DinsosPMD	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Berpotensi menimbulkan intervensi kebijakan pemerintah/pim pinan	menjaga dan mendukung kebijakan pemerintah/pim pinan	sampai ybs diangkat dalam jabatan
11	Nota dinas yang bersifat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Berpengaruh pada penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	melancarkan proses kebijakan pimpinan	menyesuaikan aturan yang berlaku

12	Naskah soal ujian kepala desa-perangkat desa	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaaan ujian	menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	sampai selesaiya pelaksanaan ujian
----	--	---	---	--	------------------------------------

KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN WONOSOBO,



Dra. HARTI, MM

NIP. 19711227 199101 2 001